



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pulai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Ringkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 109 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pulai (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 174);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian

hukum terhadap Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

(1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Silaut Kecamatan Silaut.
- b. Sebelah Timur : Nagari Silaut Kecamatan Silaut
- c. Sebelah Selatan : Nagari Pasir Binjai, Nagari Durian Seribu dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.
- d. Sebelah Barat : Nagari Silaut, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.

(2) Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:

- a. batas Nagari Sungai Pulai dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d:
 1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut (Lahan Sukati) dengan koordinat $2^{\circ} 23' 16,917''$ LS dan $101^{\circ} 6' 33,969''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran drainase primer sampai pada TK13.01.15.2001-15.2004-001 terletak di jembatan (dekat lahan Supriadi) dengan koordinat $2^{\circ} 22' 27,676''$ LS dan $101^{\circ} 6' 28,133''$ BT yang merupakan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
 3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti saluran drainase primer sampai pada PABU 13.01.15.2001-2004 013 terletak di lahan (Doni Fernandes) dengan koordinat $2^{\circ} 22' 16,464''$ LS dan $101^{\circ} 6' 26,245''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;

4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti saluran drainase primer sampai pada TK13.01.15.2001-15.2004-002 terletak di jalan (sisi paling timur PT SAPTA) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 29,495''$ LS dan $101^{\circ} 6' 9,930''$ BT ditandai dengan PABU 13.01.15.2001-2004 014 terletak di jalan (sisi paling timur PT SAPTA) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 29,456''$ LS dan $101^{\circ} 6' 9,679''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
 5. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada PABU 13.01.15.2001-2004 021 terletak di lahan (tikungan jalan poros PT SAPTA) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 30,729''$ LS dan $101^{\circ} 5' 36,990''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut;
 6. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada TK13.01.15.2001-15.2004-003 terletak di drainase (PT SAPTA) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 31,375''$ LS dan $101^{\circ} 3' 29,193''$ BT dan PABU 13.01.15.2001-2004 050 terletak di lahan (Jaya) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 32,055''$ LS dan $101^{\circ} 3' 29,451''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; dan
 7. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan PT SAPTA sampai pada TK13.01.15.2001-15.2004-15.2009-000 terletak di drainase (PT SAPTA dekat lahan Uwo Lubuk Pinang) dengan koordinat $2^{\circ} 21' 56,777''$ LS dan $101^{\circ} 3' 22,933''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
- b. batas Nagari Sungai Pulai dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan Pak Sukati dengan koordinat $2^{\circ}23'16.917''$ LS dan $101^{\circ}6'33.969''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Sungai Pulai Kecamatan Silaut dan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan ditandai dengan pilar PABU

- 13.01.15.2004-2005 012 terletak di Lahan Pak Sukati dengan koordinat $2^{\circ}23'15.749''$ LS dan $101^{\circ}6'32.961''$ BT yang merupakan pilar acuan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut;
2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti Sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2005-001 terletak di jembatan ke Nagari Sungai Pulai dengan koordinat $2^{\circ} 23' 16.522''$ LS dan $101^{\circ} 6' 3.410''$ BT yang merupakan batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut dengan Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; dan
 3. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut lokasi terdekat Lahan Pak Marlis dengan koordinat $2^{\circ}23'7.149''$ LS dan $101^{\circ}4'15.142''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
- c. batas Nagari Sungai Pulai dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Marlis) dengan koordinat $2^{\circ}23'7.149''$ LS dan $101^{\circ}4'15.142''$ BT yang merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; dan
 2. Selanjutnya mengarah ke arah Barat Laut mengikuti Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di Batang Silaut (dekat Lahan Pak Ali Ahmad) dengan koordinat $2^{\circ}22'31.079''$ LS dan $101^{\circ}3'25.953''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.
- d. batas Nagari Sungai Pulai dengan Nagari Lubuk Bunta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d:
1. Dimulai dari TK13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di Muara Saluran Drainase (dekat lahan Pak Ali Ahmad) dengan koordinat $2^{\circ} 22' 31,079''$ LS dan $101^{\circ} 3' 25,953''$ BT yang

merupakan Simpul Batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan

2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2004-15.2008-15.2009-000 terletak di Muara Saluran Drainase dengan koordinat $2^{\circ} 22' 28,770''$ LS dan $101^{\circ} 3' 18,116''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
- e. batas Nagari Sungai Pulau dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2004-15.2009-000 terletak di tengah drainase lahan sawit (dekat lahan Uwo Lubuk Pinang) dengan koordinat $2^{\circ}21'56.777''$ LS dan $101^{\circ}3'22.933''$ BT merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan ditandai PABU 13.01.15.2004-2009 004 dengan koordinat $2^{\circ}21'57.262''$ LS dan $101^{\circ}3'23.306''$ BT terletak di lahan sawit (dekat lahan Uwo Lubuk Pinang) merupakan pilar acuan batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
 2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase PT SAPTA sampai pada TK13.01.15.2004-15.2008-15.2009-000 terletak di Muara Saluran Drainase dengan koordinat $2^{\circ} 22' 28,770''$ LS dan $101^{\circ} 3' 18,116''$ BT yang merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.
- (3) Batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Sungai Pulau Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pilar yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak merubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 4 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR :79

